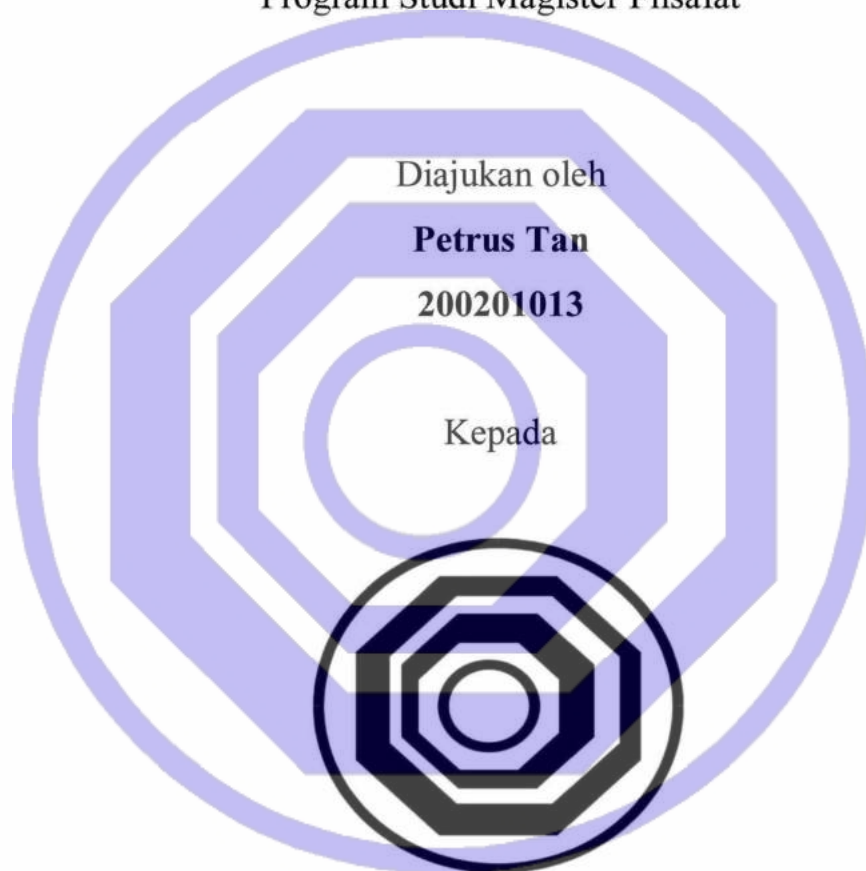


**POPULISME KANAN DAN REIMAJINASI SOLIDARITAS  
KEBANGSAAN: SEBUAH KAJIAN BERDASARKAN  
KRITIK MICHAEL SANDEL TERHADAP LIBERALISME  
DAN TIRANI MERITOKRASI**

Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Magister  
Program Studi Magister Filsafat



**PROGRAM PASCASARJANA  
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

Jakarta, Juli 2022

# TESIS

## POPULISME KANAN DAN REIMAJINASI SOLIDARITAS KEBANGSAAN: SEBUAH KAJIAN BERDASARKAN KRITIK MICHAEL SANDEL TERHADAP LIBERALISME DAN TIRANI MERITOKRASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh


**Petrus Tan**

NIM:200201013

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal  
25 Mei 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

### PEMBIMBING

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. J. Sudarminta

Pembimbing Pendamping

  
Dr. A. Andang Listya Binawan

Disahkan pada tanggal 10 Juli 2022

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Filsafat

  
Prof. Dr. J. Sudarminta

Ketua  
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

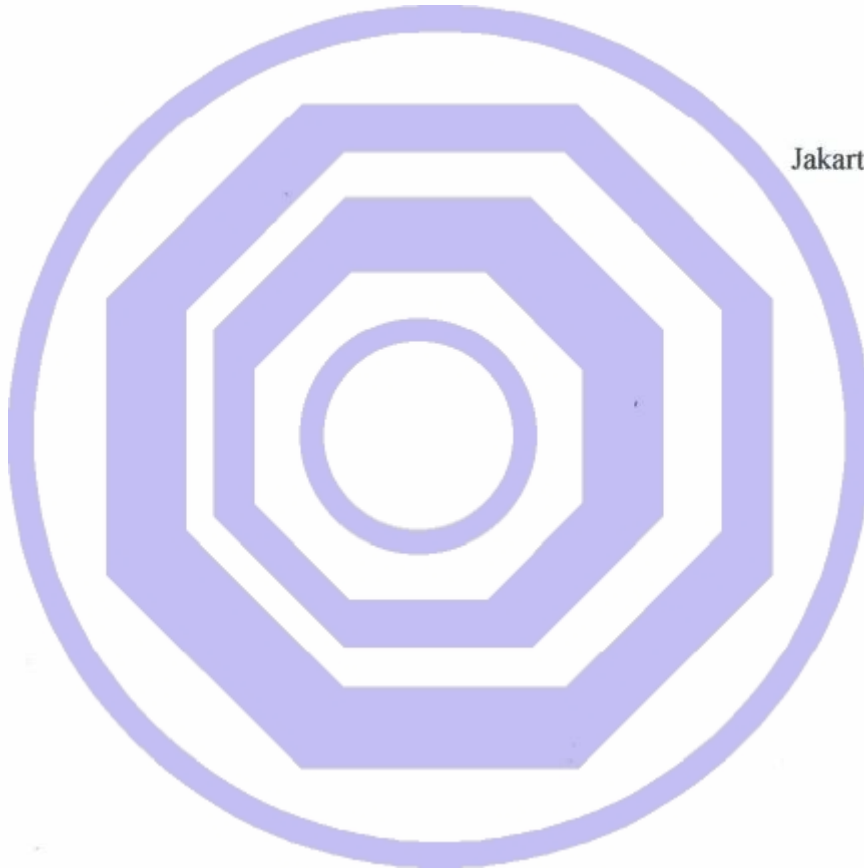
  
Thomas Hidya Tjaya, Ph.D



## PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa **di dalam tesis ini tidak terdapat teks:**

1. Yang pernah diajukan sebagai karya tertulis atau bagian dari karya tulis di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan, atau
2. Yang sudah pernah dipublikasikan, atau
3. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu diberitahukan dalam catatan tertulis terhadap teks itu dan tulisan itu, apabila sudah dipublikasikan, disebutkan dalam daftar pustaka.



Jakarta, 25 Mei 2022

Petrus Tan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penulisan .....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II MENGENAL SANDEL DAN POKOK-POKOK PEMIKIRANNYA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengantar.....	15
2.2 Perjumpaan dengan Filsafat .....	15
2.3 Latar Belakang Pemikiran.....	18
2.4 Karya-Karya Sandel .....	23
2.5 Pokok-Pokok Pemikiran Sandel.....	25
2.5.1 Gagasan tentang Keadilan dan Konsep Hidup Baik.....	25
2.5.2 Gagasan tentang Individu dan Komunitas .....	28
2.5.3 Gagasan tentang Kebebasan dan Otonomi Individu.....	31
2.5.4 Gagasan tentang Politik .....	34
2.6 Rangkuman .....	38

BAB III KEBANGKITAN POPULISME KANAN DAN KRITIK SANDEL	
TERHADAP LIBERALISME .....	39
3.1 Pengantar.....	39
3.2 Kebangkitan Populisme Kanan .....	39
3.2.1 Memahami Populisme (Kanan).....	39
3.2.2 Populisme Kanan dan Demokrasi (Liberal) .....	43
3.3 Pandangan Rawls tentang Keadilan sebagai <i>Fairness</i> .....	46
3.4 Tinjauan Umum Kritik Komunitarian .....	50
3.5 Kritik Sandel terhadap Pandangan Rawls.....	54
3.5.1 Prioritas Hak atas Kebaikan .....	54
3.5.2 Kritik terhadap <i>Unencumbered-Self</i> .....	61
3.5.3 Problem Filosofis Prinsip Perbedaan.....	69
3.6 Rangkuman .....	75
BAB IV POPULISME KANAN DAN KEGAGALAN REPUBLIK PROSEDURAL .....	77
4.1 Pengantar.....	77
4.2 Ketakcukupan Diagnosis atas Populisme Kanan .....	78
4.3 Krisis Demokrasi dan Kekecewaan.....	83
4.4 Netralitas Liberal dan Kegagalan Republik Prosedural.....	87
4.5 Korupsi Nilai dan Neo-liberalisme: Di Mana Pasar Merusak Moral dan Demokrasi? .....	94
4.5.1 Tirani Pasar dan Korupsi Nilai.....	95
4.5.2 Neo-liberalisme dan Ketidaksetaraan .....	101
4.6 Rangkuman .....	105
BAB V POPULISME KANAN DAN TIRANI MERITOKRASI .....	106
5.1 Pengantar.....	106
5.2 Memahami Meritokrasi.....	107

5.3 Meritokrasi sebagai Ideologi.....	112
5.4 Meritokrasi, Serangan Populis dan Kegagalan Politik Progresif.....	122
5.5 Meritokrasi Teknokratis versus Keputusan Moral.....	127
5.6 Meritokrasi, Populisme Kanan dan Krisis Solidaritas.....	132
5.6.1 Konsep <i>Smaller Solidarity</i> .....	132
5.6.2 Meritokrasi dan Krisis Solidaritas.....	135
5.7 Rangkuman.....	141
BAB VI REIMAJINASI SOLIDARITAS KEBANGSAAN.....	142
6.1 Pengantar.....	142
6.2 Revitalisasi Diskursus Publik.....	143
6.3 Krisis Solidaritas di Indonesia.....	150
6.4 Populisme Kanan dan Krisis Solidaritas.....	151
6.4.1 Populisme Kanan: Populisme Islam dan Absennya Politik Progresif.....	151
6.4.2 Politik Teknokratis atau Klaim Kebenaran?.....	154
6.4.3 Meritokrasi dan Populisme Kanan di Indonesia.....	156
6.5 Pancasila dan Reimajinasi Solidaritas Bangsa.....	159
6.6 Rangkuman.....	164
BAB VII PENUTUP.....	165
7.1 Pengantar.....	165
7.2 Catatan Kritis.....	165
7.3 Kesimpulan.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....	177

## ABSTRAK

[A] Petrus Tan (200201013)

[B] Populisme Kanan dan Reimajinasi Solidaritas Kebangsaan: Sebuah Kajian Berdasarkan Kritik Michael Sandel terhadap Liberalisme dan Tirani Meritokrasi.

[C] v + 184 halaman; 2022

[D] Populisme Kanan, Liberalisme, Komunitarianisme, Tirani Meritokrasi, Solidaritas, Konsep Hidup Baik, Republik Prosedural, Neo-liberalisme, Keadilan Kontributif, Pancasila.

[E] Tesis ini bertujuan menguraikan populisme kanan berdasarkan kritik Michael Sandel terhadap liberalisme dan tirani meritokrasi. Untuk itu, karya-karya Sandel seperti *Liberalism and the Limit of Justice*, *Democracy's Discontent* dan *The Tyranny of Merit* menjadi acuan penting. Bagi Sandel, populisme kanan adalah buah kegagalan politik progresif. Kegagalan ini terkait dua soal utama yang menimpa masyarakat AS yaitu pembentukan republik prosedural yang ditopang oleh prinsip-prinsip liberalisme, dan tirani meritokrasi yang menghancurkan visi solidaritas dan komunitas sebagai basis etis demokrasi. Dengan menghindari konsep hidup baik, liberalisme menciptakan dua masalah utama yang memicu polarisasi sosial. Pertama, warga negara kehilangan kekuatan moral yang menyatukan mereka sebagai satu komunitas. Kedua, akibat privatisasi konsep hidup baik, tatanan moral komunitas-komunitas partikular hingga bangsa terurai dan hancur. Polarisasi sosial diperparah oleh tirani meritokrasi. Inti etika meritokrasi adalah jika peluang dibagi secara *fair* kepada setiap orang, maka orang-orang sukses pantas menghirup kesuksesan mereka sepuas-puasnya, sementara bagi yang kalah, tak ada yang perlu disalahkan selain diri sendiri. Pandangan ini secara moral menghina para buruh yang tak bergelar sarjana. Penghinaan moral inilah jantung populisme kanan. Untuk keluar dari situasi ini, Sandel menganjurkan revitalisasi diskursus publik yaitu peninjauan ulang premis-premis dasar liberalisme kontemporer. Saya juga akan memperlihatkan relevansi pemikiran Sandel di Indonesia dalam upaya reimajinasi solidaritas bangsa.

[F] 147 (1984-2021)

[G] Prof. Dr. J. Sudarminta

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai membawa banyak penderitaan dan kematian, tetapi juga pesan berharga bagi kehidupan bersama umat manusia, entah sebagai warga bangsa atau masyarakat dunia. Salah satunya adalah kesadaran tentang betapa pentingnya solidaritas atau perasaan bahwa kita sedang berada di atas perahu yang sama sekarang. Martin Luther King, Jr. mengatakan hal itu lebih dari setengah abad lalu: “Kita mungkin datang dengan kapal berbeda, tetapi kita berada dalam perahu yang sama sekarang.”<sup>1</sup> Kesadaran senasib dan sepenanggungan ini adalah jiwa dan nyawa dari sebuah bangsa sebagai- memakai istilah Benedict Anderson- *imagined political community* (komunitas politis yang dicitrakan). Tanpa solidaritas otentik ini, sebuah bangsa mustahil berdiri tegak. Pandemi menegakkan kembali kesadaran kolektif kita sebagai sebuah bangsa serta memugar basis etis-moral sebuah tatanan demokratis di tengah menjamurnya ideologi-ideologi yang cenderung mendefinisikan kita sebagai individu Hobbesian: rasional namun *self-interest* dan asosial. Namun seruan membangun solidaritas bukan saja direnungkan pada masa pandemi melainkan harus menjadi gambaran kehidupan bersama kita setiap hari. Suatu gambaran tentang perlunya politik dan demokrasi dibangun di atas kepedulian etis akan penderitaan orang lain.

Sayangnya, pengalaman demokrasi di abad ke-21 memperlihatkan, ikatan-ikatan kolektif, solidaritas komunitas dan basis etis yang mengokohkan bangunan demokrasi sedang diterpa kekuatan-kekuatan anti-demokratis. Maka, ada pendapat bahwa demokrasi di seluruh dunia sedang terjungkal ke dalam krisis hebat. Venezuela, Thailand, Turki, Hungaria, Polandia, Indonesia dan beberapa negara lainnya memasuki apa yang disebut ahli demokrasi terkemuka, Larry Diamond, “masa resesi demokrasi”.<sup>2</sup> Salah satu penanda resesi demokrasi tersebut adalah fenomena kebangkitan hantu populisme kanan. Istilah “hantu populisme” dipakai Ghita Ionescu dan Ernest Gellner dalam sebuah ungkapan terkenal untuk membuka karya mereka tentang populisme: “*A spectre is haunting the world-populism*”- Seekor hantu sedang memburu dunia, populisme namanya.<sup>3</sup> Ungkapan ini menyiratkan, populisme adalah ancaman demokrasi namun menjadi kata kunci politik abad ke-21.

---

<sup>1</sup> “We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now.” Slavoj Žižek, *Pan(dem)ic Covid-19 Shakes the World* (New York & London: OR Books, 2020), 15.

<sup>2</sup> Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, *How Democracy Die* (UK: Penguin Books, 2018), 204.

<sup>3</sup> Danniele Albertazzi and Duncan McDonnell, “Introduction: The Sceptre and The Spectre,” in *Twenty-First Century Populism, The Spectre of Western Europe Democracy*, ed. Danniele Albertazzi and Duncan McDonnell (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 1.



Secara singkat, populisme adalah ideologi berpusat tipis yang menganggap masyarakat perlu dipisahkan menjadi kubu homogen dan antagonis, rakyat bermoral versus elit korup, dan yang berpendapat bahwa politik harus menjadi kehendak rakyat. Disebut ideologi berpusat tipis karena populisme sangat lentur sehingga mudah bersenyawa dengan ideologi-ideologi rigid seperti fasisme, sosialisme/komunisme dan liberalisme. Seorang fasis, sosialis, liberal bisa menjadi seorang populis.<sup>4</sup> Seorang populis gampang mengeksploitasi ide liberal seperti HAM atau kebebasan untuk agenda politik yang kontra-produktif: anti-HAM dan anti-kebebasan.

Jika pada masa lalu, terutama di Amerika Latin, populisme adalah pembela demokrasi karena konsisten memperjuangkan keadilan sosial (populisme kiri), dewasa ini populisme memakai fasilitas demokrasi untuk merebut tujuan-tujuan konservatif yang merusak demokrasi.<sup>5</sup> Fakta ini menunjukkan, populisme licin bagai belut: populisme kiri, yang dalam pendekatan antagonistik Laclau dikarakterisasi sebagai ranah pertarungan diskursif rakyat tertindas versus elit oligarkis, akan dengan mudah bergeser ke populisme kanan tatkala para aktor populis mengubah ranah diskursif dan argumen menjadi pertarungan sentimen identitas antara “kita” vs “mereka”. Cara-cara mengorganisasi massa dengan memelintir sentimen ultra-nasionalisme, agama dan anti-minoritas adalah permainan khas hantu populisme kanan.

Dengan pemelintiran sentimen, populisme kanan menjadi ancaman demokrasi di banyak negara dewasa ini. Kemenangan Trump pada pemilihan presiden AS pada tahun 2016 lewat pembengkakan sentimen ultra-nasionalisme, propaganda Le Pen yang memikat massa tentang dominasi pekerja migran di tempat-tempat kerja di Prancis,<sup>6</sup> fenomena *Brexit* di Inggris, dan pemelintiran sentimen agama di Indonesia dalam pemilihan Presiden 2014 dan 2019 adalah sederetan gejala kebangkitan populisme kanan. Sekurang-kurangnya melalui beberapa fakta itu, kita menyaksikan bahwa dewasa ini kejayaan dan keagungan demokrasi, terutama demokrasi liberal, harus menghadapi krisis dan tantangan yang menyeruak dari protes dan gerakan populis.

Jika kita menoleh ke belakang yaitu ke tahun 1990-an, kejayaan demokrasi liberal jarang terusik oleh seekor hantu manapun. Negara-negara demokrasi liberal Barat tak tertandingi dalam kekuatan militer, ekonomi dan ideologi. Gaya demokrasi Barat dipandang dan diyakini secara luas sebagai “satu-satunya permainan di kota”.<sup>7</sup> Hal itu terungkap secara eksplisit misalnya dalam buku Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (1992). Tesis utama Fukuyama ialah bahwa ide demokrasi liberal kini telah menang di seluruh

---

<sup>4</sup> Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser, *Populism A Very Short Introduction* (USA: Oxford University Press, 2017), 6.

<sup>5</sup>F. Budi Hardiman, “Kebangkitan Populisme Kanan dalam Negara Hukum Demokratis,” *Prisma, Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi*, Vol. 36 (2017): 5.

<sup>6</sup> Hardiman, “Kebangkitan Populisme Kanan,” 5.

<sup>7</sup> Levitsky and Ziblatt, *How Democracy Die*, 205.

dunia, dan kemenangan ini terjadi sepanjang lintasan sejarah sebagaimana telah diramalkan filsuf besar Jerman, Hegel. Menurut Fukuyama, di akhir Perang Dingin, demokrasi liberal Barat tampil sebagai bentuk akhir pemerintahan manusia, titik akhir evolusi ideologis, bentuk akhir politik dan akhir sejarah. Sementara bentuk-bentuk pemerintahan lain seperti fasisme, komunisme, teokrasi dan monarki absolut dicirikan oleh cacat serius dan irasionalitas yang mengarah kepada kehancuran, demokrasi liberal bebas dari cacat fundamental seperti itu karena merupakan implementasi lengkap prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan individu.<sup>8</sup>

Namun optimisme tersebut tidak bertahan lebih lama sebab dua dasawarsa kemudian sudah mulai tampak bahwa kekuasaan dunia telah bergeser. Uni Eropa dan AS menyaksikan pengaruh globalnya mulai terkikis, sementara Rusia dan Tiongkok dengan kultur komunisme yang masih kuat tampak makin berpengaruh. Dalam *The Clash of Civilization and the Remaking of The World Order* (1996) dengan tesis sentralnya tentang “benturan peradaban”, Huntington menyatakan krisis demokrasi liberal tersebut. Menurutnya, benturan peradaban telah terjadi seiring rekonfigurasi politik global di sepanjang lintas batas kultural sebagai eksekusi perubahan identitas dan simbol-simbol secara dramatis pasca-Perang Dingin. Salah satu contoh yang diangkat Huntington ialah meledaknya antagonisme Islam dan Barat yang berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, konfrontasi ini bukan sekadar konfrontasi antara dua peradaban berbeda melainkan konfrontasi antara dua rangkaian nilai yang berbeda.<sup>9</sup> Di tengah desakan liberal untuk mengosongkan komunitas-komunitas partikular, bangsa-bangsa di dunia merasa perlu menemukan kembali identitasnya dengan kembali kepada komunitas-komunitas partikular yang memberi mereka makna, identitas dan tujuan hidup.

Huntington tak sendiri membaca krisis demokrasi liberal pasca-Perang Dingin. Peter L. Berger dalam artikel “The Desecularization of the World” sepakat dengan Huntington bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, politik internasional akan dipengaruhi benturan peradaban daripada konflik ideologis. Menurut Berger, dendam kultural sepanjang perang dingin sedang mencuat ke permukaan. Beberapa dendam kultural muncul dalam bentuk ideologis seperti tuntutan sejumlah pemerintahan dan intelektual di Utara dan Selatan Asia untuk membangun kembali identitas Asia. Resistensi dan kecurigaan terhadap runtuhnya peradaban Asia akibat westernisasi yang membonceng kolonialisme Barat makin muncul ke permukaan.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi liberal bukan titik akhir sejarah.

---

<sup>8</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: The Free Press, 1992), xi.

<sup>9</sup> Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, penerj. M. Sadat Ismail (Jakarta: Penerbit Qalam, 2012), 3.

<sup>10</sup> Peter L. Berger, “The Desecularization of the World: A Global Overview,” in *The Desecularization of the World Resurgent Religion and World Politics*, ed. Peter L. Berger (Washington: William B. Eerdmans Publishing Company, 2005), 14-17.

Di era kontemporer, kritik-kritik berhaluan kiri terhadap demokrasi liberal mulai muncul dalam wacana filsafat politik. Kritik-kritik ini mengumumkan kematian subjek, yang berarti berakhirnya ideologi yang diteriakkan para liberal konservatif seperti Fukuyama. Para filsuf seperti Carl Schmitt, Chantal Mouffe dan Ernest Laclau menantang prinsip-prinsip liberalisme dalam politik sambil menyodorkan konsep kewarganegaraan agonistik. Mereka berpendapat, kecenderungan mengharmonisasikan perbedaan ke dalam suatu rasionalitas tunggal dan kompromi terbatas konsensus rasional menyebabkan liberalisme gagal memahami pelbagai posisi subjek dalam usaha mengartikulasi tuntutan-tuntutan politiknya.<sup>11</sup> Karena postulat utama liberalisme adalah setiap orang, sebagai person, sama dengan person lainnya, maka liberalisme tidak mampu menangkap fenomena ketidaksetaraan antara warga kelas pertama dan kelas kedua, mereka yang diakui dan mereka yang dieksklusi, mereka yang diuntungkan dan mereka yang dirugikan oleh struktur politik dan ekonomi. Menurut mereka, demokrasi perlu dikembalikan kepada substansinya yaitu sebagai *chain of equivalence* (rantai persamaan) dari berbagai agen perubahan, atau *the possibility of a distinction* (posibilitas perbedaan), dalam perjuangan merebut kesetaraan, mewujudkan emansipasi dan menentukan keputusan politik.<sup>12</sup>

Dengan bangkitnya hantu populisme kanan di berbagai negara dewasa ini, kita mempunyai bukti yang memadai untuk mengatakan bahwa sekarang ini tampaknya demokrasi (liberal) bukan lagi sesuatu yang tak terusik dan tergoyahkan. Krisis ini bahkan pertama-tama tumbuh di AS dan negara-negara Barat dengan melemahnya peran ekonomi dan bangkitnya partai-partai politik anti-imigran. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, populisme kanan mudah bersenyawa dengan politik identitas.

Melihat berbagai dinamika dan fakta tersebut, timbul pertanyaan, mengapa populisme kanan bangkit di negara-negara dengan tradisi politik dan demokrasi liberal yang kuat? Apa hubungannya dengan pengandaian-pengandaian filosofis dan ideologis liberalisme? Apa kritik fundamental terhadap asumsi-asumsi liberalisme tersebut? Dan bagaimana liberalisme memperbarui diri, atau pandangan filosofis apa yang kita ajukan sebagai alternatif dan peralatan konseptual untuk merevitalisasi diskursus publik demi masa depan demokrasi yang lebih baik?

Terkait beberapa pertanyaan tersebut, tesis atau posisi saya adalah kebangkitan populisme kanan merupakan akibat melemahnya solidaritas komunitas dan hancurnya ikatan-ikatan kolektif yang dapat diatasi bukan dengan melonggarkan ikatan-ikatan kolektif itu

---

<sup>11</sup> Andreas Kalyvas, "The Democratic Narcissus," in *Law and Agonistic Politics*, ed. Andrew Schaap (UK: University of Exeter, 2009), 32.

<sup>12</sup> Chantal Mouffe, *The Democratic Paradox* (London: Verso, 2000), 39-40.

melainkan justru dengan mengencangkannya. Solidaritas dan ikatan kolektif yang dimaksud bukan *ethnic nation* (ikatan primordial) melainkan *civic nation* (persekutuan warga negara melampaui primordialisme).<sup>13</sup> Melemahnya solidaritas dapat merupakan akibat dari menguatnya pengaruh paham-paham individualistik dan intoleran, atau dari penyimpangan di dalam demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, kebangkitan populisme kanan pada dasarnya adalah gejala krisis besar politik dan demokrasi itu sendiri. Seperti dikatakan Margareth Canovan, di samping sebagai hantu bagi demokrasi, patut dipikirkan secara serius bahwa populisme kanan adalah suatu bayangan yang dicetak oleh demokrasi itu sendiri.<sup>14</sup>

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut dan memperkuat asumsi di atas, dalam tulisan ini saya mengajukan sudut pandang dan pemikiran filsuf politik AS, Michael J. Sandel. Yang hendak saya uraikan dalam tulisan ini adalah diagnosis Sandel atas fenomena kebangkitan populisme kanan yang menimpa berbagai negara demokrasi saat ini. Saya memilih Sandel di tengah berbagai model diagnosis dan kerangka konseptual tentang populisme kanan dengan alasan bahwa Sandel mendasarkan analisisnya pada kritik filosofis atas liberalisme dan tirani meritokrasi. Dia tidak bergerak dari asumsi-asumsi umum dalam teori-teori politik melainkan dari sebuah kritik filosofis yang amat fundamental bahwa baik liberalisme maupun tirani meritokrasi dapat menghancurkan solidaritas komunitas sebagai basis etis politik dan demokrasi. Kehancuran solidaritas ini membuka pintu bagi kedatangan hantu populisme kanan. Penghindaran konsep hidup baik, sepiunya diskursus moral substantif dalam demokrasi, menguatnya politik teknokratik liberal, meningkatnya hegemoni pasar dan neo-liberalisme, dan krisis solidaritas adalah beberapa pokok pikiran Sandel dalam kritiknya terhadap liberalisme dan tirani meritokrasi sebagaimana akan diuraikan dalam penelitian ini. Uraian atas beberapa pokok pikiran tersebut akan memperlihatkan sudut pandang Sandel yang khas dalam membedah fenomena populisme kanan. Karena itu, penelitian ini akan menguraikan kritik Sandel terhadap liberalisme, terutama liberalisme Rawls, dan tirani meritokrasi serta bagaimana Sandel mengurai fenomena populisme kanan yang terjadi belakangan ini dalam hubungan dengan kritik tersebut.

Dengan memperhatikan berbagai karyanya, saya menemukan kesan bahwa Sandel sangat konsisten mengurai persoalan-persoalan politik di negaranya (AS) maupun persoalan politik global, berdasarkan keterangan filosofis dan kerangka kritiknya terhadap konsep liberalisme prosedural John Rawls dalam buku *Liberalism and the Limit of Justice* (1982). Kritiknya terhadap liberalisme prosedural Rawls serta analisisnya atas berbagai kejadian politik

---

<sup>13</sup> F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 101.

<sup>14</sup> Benjamin Arditi, "Populism as an Internal Pheriphery of Democratic Politics," in *Populism and the Mirror of Democracy*, ed. Fransisco Panizza (London: Verso, 2005), 72.

dewasa ini menunjukkan bahwa antara filsafat dan politik memang selalu ada afinitas tak terceraikan. Dengan kata lain, terdapat relasi tak terpisahkan antara praktek politik dan pengandaian-pengandaian teoretis di belakangnya. Tentang itu, Sandel berpendapat, praktek-praktek politik dan institusi-institusi modern adalah perwujudan dari teori politik tertentu. Keterlibatan dalam praktek politik terkait dengan teori-teori tertentu yang diyakini.<sup>15</sup> Dengan demikian, institusi dan praktek politik liberal-modern adalah perwujudan dari sebuah ideologi bernama liberalisme, yang disebut Sandel sebagai filsafat publik masyarakat liberal seperti AS.

Kritik Sandel terhadap liberalisme sering disebut sebagai perspektif komunitarian, sama dengan kritik para pemikir komunitarian lainnya seperti Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, dan Michael Walzer. Namun, Sandel keberatan dengan label “komunitarian” tersebut. Dalam pengantar edisi kedua *Liberalism and the Limit of Justice*, Sandel menulis bahwa menempatkan pemikirannya sebagai “komunitarian” adalah sebuah kekeliruan. Karena itu, saya akan mempertahankan bahwa posisi komunitarian Sandel berbeda secara substansial dengan posisi kaum komunitarian umumnya, sebagaimana dikatakan oleh Sandel sendiri. Menurutnya, perdebatan liberalisme dan komunitarianisme yang telah dimulai pada awal 1980 adalah perdebatan antara mereka yang mengagungkan kebebasan individual dan mereka yang berpikir bahwa nilai-nilai komunitas atau kehendak mayoritas harus diunggulkan, atau perdebatan antara mereka yang percaya pada HAM universal dan mereka yang mempertahankan nilai tradisi. Sejauh komunitarianisme adalah nama lain dari mayoritarianisme atau gagasan bahwa hak-hak harus didasarkan pada nilai-nilai suatu komunitas yang diwariskan dari masa tertentu, Sandel dengan tegas menolak komunitarianisme semacam itu.<sup>16</sup>

Pokok perhatian Sandel yang membedakannya dari posisi komunitarian pada umumnya bukan persoalan apakah hak dan keadilan itu penting atau tidak, melainkan apakah hak bisa diidentifikasi dan dijustifikasi dalam suatu cara yang tidak mengandaikan konsep hidup baik tertentu. Dengan kata lain, pokok perhatian Sandel bukan apakah klaim-klaim individu atau komunal yang berbobot lebih besar, melainkan apakah prinsip-prinsip keadilan yang menuntun struktur dasar suatu masyarakat dapat netral dari respek terhadap keyakinan religius dan moral yang dimiliki warganya.<sup>17</sup> Dengan demikian, Sandel mengoreksi liberalisme bukan karena

---

<sup>15</sup> M. Sandel, “The Procedural Republic and The Unencumbered Self,” *Political Theory*, Vol. 12, No. 1 (1984), 81, <http://links.jstor.org/sici?sici=0090-5917%28198402%2912%3A1%3C81%3ATPRATU%3E2.0.CO%3B2-X>.

<sup>16</sup> Michael Sandel, *Liberalism and The Limit of Justice*, Second Edition (USA: Cambridge University Press, 1998), ix-x.

<sup>17</sup> Sandel, *Liberalism*, x.

liberalisme membela hak-hak individual melainkan karena liberalisme mempertahankan hak-hak individual dengan tidak mengacu kepada konsep hidup baik.<sup>18</sup>

Itu berarti, yang menjadi objek kritik Sandel adalah liberalisme prosedural yang menonjol dalam diskursus filsafat politik dan praktek demokrasi saat ini. Secara politis, liberalisme prosedural adalah keyakinan bahwa negara harus netral dari konsep hidup baik. Penghindaran dari konsep hidup baik dan perdebatan etis membuat demokrasi liberal berciri teknokratik. Secara filosofis, liberalisme prosedural memprioritaskan hak daripada konsep hidup baik. Sandel tetap mempertahankan nilai-nilai liberal seperti toleransi, kebebasan individual, HAM, perlindungan individu dari totalitarianisme negara. Karena komitmen pada nilai-nilai penting liberal tersebut, Sandel menentang hirarki dan tradisi. Maka, menjadi jelas bahwa yang dikritik Sandel ialah posisi liberalisme yang kurang menghormati dimensi sosial individu. Sandel mendasarkan kritiknya pada ketertarikan untuk memahami bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan opini dan pandangan etis tentang hidup yang baik. Apa yang dimaksud dengan konsep hidup baik ialah hak-hak terletak di atas peran moral dari tujuan-tujuan yang dikejar hak-hak tersebut. Sebagaimana Aristoteles, sebelum kita mendefinisikan hak atau institusi ideal, sangat penting menentukan hakekat cara hidup yang paling diinginkan.<sup>19</sup> Jadi, hak individu menggantungkan justifikasinya pada basis etis komunitas yaitu tujuan bersama yang disebut *common good* (kebaikan bersama).

Dengan demikian, tampak beberapa pengandaian dasar liberalisme Rawls yang dikritik Sandel. Dalam *A Theory of Justice* (1971), dengan merujuk pada Kant, tesis utama Rawls adalah etika politik tidak dapat berpijak pada konsep hidup baik. Alasannya, konsep hidup baik bersifat partikular, kebetulan sehingga tak dapat diberi pendasaran universal.<sup>20</sup> Contohnya, kebahagiaan. Meskipun semua orang sepakat bahwa semua manusia mau bahagia, tetapi versi kebahagiaan itu berbeda-beda dan pengertian orang tentang apa itu hidup bahagia juga pasti tak sama. Tugas politik menurut Rawls bukanlah menentukan model kebahagiaan dan tujuan akhir yang harus dicapai warga negara melainkan hanya memberikan “aturan main” agar dalam pengejaran kebahagiaan dan tujuan akhir itu, kebebasan yang satu tidak memangsa kebebasan yang lain.

Dengan kata lain, sebagaimana penafsiran Sandel, keutamaan keadilan menurut Rawls menggambarkan tidak hanya prioritas moral tetapi juga sebagai bentuk justifikasi yang istimewa; bahwa hak mendahului kebaikan, tidak hanya dalam klaimnya tetapi juga karena

---

<sup>18</sup> Michael Sandel, “Liberalism and Republicanism, Friend or Foes?,” *The Review of Politics*, Vol. 61, No.2 (1999), 210, <http://www.jstor.org/stable/1408354>.

<sup>19</sup> Sandel, “Liberalism and Republicanism,” xi.

<sup>20</sup> Otto Gusti Madung, “Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel,” *Jurnal Ledalero*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2020), 130, DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.212.127-144>.

prinsip-prinsipnya diturunkan secara independen. Itu berarti, tidak seperti kewajiban praktis lainnya, prinsip-prinsip keadilan dibenarkan dengan tidak bergantung pada visi partikular tentang yang baik.<sup>21</sup> Jadi menurut liberalisme Rawls, masyarakat yang adil tidak berupaya mempromosikan tujuan tertentu tetapi memungkinkan warganya mengejar tujuan mereka sendiri, konsisten dengan kebebasan yang sama untuk semua. Oleh karena itu, masyarakat harus diatur oleh prinsip-prinsip yang tidak mengandaikan konsep tertentu tentang kebaikan. Apa yang membuat masyarakat adil adalah bahwa setiap orang berhak memilih tujuannya sendiri. Di sini, sebagaimana hak mendahului kebaikan, demikianpun subjek mendahului tujuan.<sup>22</sup> Subjek mendahului tujuan mempunyai arti yaitu pertama, hak individual tidak boleh dikorbankan demi kepentingan umum (melawan utilitarisme) dan kedua, prinsip keadilan tidak boleh dibangun di atas pandangan partikular tentang hidup baik.

Karena keadilan mendahului konsep hidup baik dan hak mendahului tujuan, maka seorang liberal tidak memiliki klaim moral yang mengikatnya bersama individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Sandel menyebut individu yang terputus dari ikatan moral dan sosial komunitas ini sebagai “*unencumbered-self*” (diri yang tak terbebani). Menurut Sandel, gagasan hak mendahului kebaikan dan subjek mendahului tujuan adalah fondasi filosofis dari konsep Rawls tentang *unencumbered-self*. *Unencumbered-self* mengandung gagasan bahwa subjek moral ada karena kemampuannya untuk mundur dari semua komitmen yang ada, dari penanda partikular sebagai anggota keluarga, agama, tradisi, budaya, etnis, gender, golongan politik, penganut ideologi tertentu, hingga komunitas politik yang lebih luas yaitu negara-bangsa.<sup>23</sup> Konsekuensinya, hak-hak individu yang dijamin negara tidak tunduk pada kalkulus kepentingan sosial, melainkan berfungsi sebagai kartu truf bagi individu dalam mencapai apa yang dianggapnya baik.

Apa implikasi politis pandangan liberal tersebut? Sandel berpendapat, implikasi politisnya adalah kita kehilangan filsafat publik yang merumuskan diskursus publik yang kuat secara moral. Jika tunduk di bawah logika liberalisme, konsep tentang tujuan bersama mesti digantikan dengan konsep prosedur yang *fair*. Sandel melihat kecenderungan bahwa sejak akhir abad ke-20, baik di AS maupun negara-negara demokrasi lainnya di dunia, terjadi pergeseran dari filsafat publik yang merumuskan tujuan bersama dengan diskursus moral yang kuat kepada prosedur yang *fair*, dari politik kebaikan kepada politik hak, dan dari republik nasional kepada republik prosedural.<sup>24</sup> Pergeseran ini memberi arti bahwa negara atau sebuah komunitas politik yang sah bukan lagi sebuah republik nasional yang berbasis solidaritas

---

<sup>21</sup> Sandel, *Liberalism*, 120.

<sup>22</sup> Sandel, *Liberalism*, 7.

<sup>23</sup> Sandel, “The Procedural Republic,” 86.

<sup>24</sup> Sandel, “The Procedural Republic,” 93.

komunitas, tujuan bersama dan tanggung jawab sosial, melainkan semata-mata sebuah prosedur yang *fair* untuk mengamankan kepentingan individu. Sandel berpendapat, prinsip netralitas, gagasan *unencumbered-self* dan prinsip subjek mendahului tujuan menciptakan polarisasi sosial dan krisis solidaritas sebab dalam prinsip tersebut terkandung pesan bahwa apa yang memisahkan kita sebagai individu lebih kuat daripada apa yang menyatukan kita sebagai warga negara.<sup>25</sup>

Berdasarkan sejumlah kritik terhadap klaim-klaim fundamental liberalisme tersebut, Sandel membaca kebangkitan populisme kanan di berbagai negara demokrasi dewasa ini. Bagi Sandel, gagasan liberal tentang hak dan keadilan yang dilepaskan dari nilai moral tujuan bersama menyebabkan hilangnya solidaritas sosial, dan hilangnya solidaritas sosial melahirkan krisis demokrasi yang ditandai dengan bangkitnya populisme kanan. Sandel berpendapat, demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Rusia, Turki, Hungaria, Polandia dan beberapa negara lain yang pernah menjanjikan harapan-harapan demokratis, saat ini dalam tingkatan bervariasi, jatuh ke dalam otoritarianisme dalam wujud populisme kanan.<sup>26</sup>

Sandel juga berpendapat, gelombang populisme kanan seperti diilustrasikan fenomena *Brexit* dan bertahannya Trump hingga akhir masa jabatannya adalah gejala kegagalan politik progresif.<sup>27</sup> Yang dimaksud politik progresif adalah sebuah politik yang memperjuangkan reformasi radikal dengan jalan melawan hegemoni neo-liberalisme. Bagi Sandel, politik progresif telah gagal sejak 1980 ketika Reagan hingga Obama dan Hillary Clinton di kemudian hari menerima sepenuh hati tesis bahwa “pemerintahan adalah masalah, pasar adalah solusi.”<sup>28</sup> Partai Demokrat yang semula dikenal sebagai partai progresif/kiri justru menjadi sangat pro-kapitalisme. Dalam konteks itulah Sandel menyebut populisme kanan sebagai buah kegagalan politik progresif. Kegagalan politik progresif berarti disorientasi partai-partai kiri (sosial-demokrat) yang membelot dari cita-cita keadilan sosial lalu jatuh ke dalam rangkulan tirani pasar global dan neo-liberalisme. Isu ini terletak di jantung kritik Sandel terhadap hegemoni pasar dan ketidaksetaraan yang juga akan diuraikan dalam penelitian ini. Sandel berpendapat,

“Seperti fenomena *Brexit* di Inggris, pemilihan Trump adalah produk kemarahan terhadap munculnya ketimpangan dan sebuah jenis globalisasi neo-liberal yang menguntungkan kelompok elite dan membuat masyarakat biasa menjadi tidak berdaya. Bangkitnya populisme kanan adalah teguran terhadap pendekatan teknokratis liberal dalam politik yang

---

<sup>25</sup> Stuart Rosenbaum, *Race, Justice and American Intellectual Traditions* (USA: Palgrave Pivot, 2018), 75, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-76198-5\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-76198-5_8).

<sup>26</sup> Michael Sandel, “Populism, Liberalism and Democracy,” *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 44(4) (2018), 353, <https://doi.org/10.1177/0191453718757888>.

<sup>27</sup> Michael Sandel, “Right-Wing Populism is a Progressive Politics Fails-Is It too Late to Save Democracy?,” *New Statesman*, May 21, 2018, Right-wing populism is rising as progressive politics fails â? is it too late to save democracy? ([newstatesman.com](http://newstatesman.com)) (diunduh 17 September 2021).

<sup>28</sup> Michael Sandel, *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* (USA: Farrar, Straus and Giroux, 2020), 24.



tuli terhadap nada kebencian dan perasaan tak berdaya dari orang-orang yang merasakan bahwa struktur ekonomi dan politik telah menyingkirkan mereka.”<sup>29</sup>

Sandel menjelaskan, bangkitnya reaksi populis kanan yang memanfaatkan kemarahan dan frustrasi orang-orang tak berdaya sebagai propaganda politik menunjukkan kelemahan liberalisme prosedural dalam politik dan demokrasi dewasa ini. Tekanan liberalisme pada *fairness* dan penghindaran dari perdebatan konsep hidup baik membawa bencana. Dengan menghindari persoalan makna, tujuan dan komunitas, liberalisme tidak mampu menangkap frustrasi dan kemarahan kelompok-kelompok yang tertekan secara sosial, politik dan ekonomi. Liberalisme juga gagal menangkap kenyataan bahwa keluhan-keluhan masyarakat tertekan ini tidak hanya soal ekonomi tetapi juga moral dan budaya, tidak hanya soal upah dan pekerjaan atau keadilan distributif, tetapi juga tentang pengakuan dan penghargaan sosial.<sup>30</sup> Jadi liberalisme tidak memiliki sumber-sumber moral dan empatik untuk memahami alienasi yang dialami kelas menengah dan kaum marginal dalam proses demokrasi teknokratik.

Melanjutkan kritik tersebut, Sandel menyusun sebuah gagasan baru dalam buku terbarunya, *The Tyranny of Merit* (2020). Dalam buku ini, Sandel mengajukan sebuah tesis fundamental bahwa populisme kanan berakar pada tirani meritokrasi. Meritokrasi mengajarkan, para pemenang sukses karena talenta dan kerja keras sendiri. Sedangkan, orang-orang gagal bernasib buruk karena kesalahan sendiri, sehingga diminta bekerja lebih keras lagi.<sup>31</sup> Sandel menyebut pandangan ini sebagai kesombongan meritokratis.

Bagi Sandel, meskipun benar bahwa prestasi individual mencerminkan kerja keras dan dedikasi pribadi, namun pandangan bahwa prestasi individual semata-mata usaha sendiri, terlepas dari peran komunitas adalah pandangan sesat,<sup>32</sup> yang basis filosofisnya ditemukan pada gagasan *unencumbered-self* liberal. Karena itu, Sandel menilai meritokrasi tidak lebih dari sebuah ideologi yaitu kesadaran palsu (Marx) yang mengikis solidaritas dan membuat masyarakat liberal seperti AS percaya bahwa prestasi individu adalah segalanya. Lagipula, menurut Sandel, prinsip kerja keras, bakat, dan retorika liberal tentang peluang setara untuk mengejar posisi-posisi strategis adalah prinsip dan retorika yang kurang tepat dan tidak realistis sebab dalam kenyataan orang-orang AS yang lahir dari keluarga miskin, sekalipun telah bekerja keras, tetap menjadi miskin sampai dewasa.<sup>33</sup> Keangkuhan meritokratis ini menghancurkan ikatan-ikatan kolektif sebagai basis etis demokrasi serta memicu penghinaan

---

<sup>29</sup> “Like the triumph of Brexit in the UK, the election of Trump was an angry verdict on decades of rising inequality and a version of globalization that benefits those at the top but leaves ordinary people feeling disempowered. It was also a rebuke for a technocratic approach to politics that is tone deaf to the resentments of people who feel the economy and the culture have left them behind.” Sandel, “Populism,” 354.

<sup>30</sup> Sandel, “Populism,” 355.

<sup>31</sup> Sandel, *The Tyranny of Merit*, 12.

<sup>32</sup> Sandel, *The Tyranny of Merit*, 19.

<sup>33</sup> Sandel, “Populism,” 356.

dan kemarahan pada kelompok yang merasa kalah. Bagai api menyambar bensin, percikan kemarahan ini dengan cepat ditangkap seorang figur populis seperti Trump yang berkobar-kobar mempropagandakan nasionalisme sempit, xenofobia, dan anti-globalisasi.

Prinsip meritokratis inilah yang disuarakan secara lantang oleh sejumlah politisi kubu Demokrat, sejak Reagan hingga Hillary Clinton. Sandel berpendapat, berbeda dari Hillary Clinton dan politisi kubu Demokrat lainnya yang menyerukan retorika meritokratis tentang prestasi, gelar universitas, tanggung jawab individual, dan mobilitas ke atas, Trump tidak melakukan hal demikian. Untuk menarik perhatian sebagian besar buruh tanpa ijazah universitas, Trump berbicara terus terang tentang para pemenang (elit) dan mereka yang kalah (para buruh) serta membuat janji "*make America great again*". Asumsi-asumsi meritokratis menghina para pekerja yang tidak berijazah universitas serta mengabaikan makna dan kontribusi kerja keras mereka bagi kebaikan bersama. Karena itu, Sandel berpendapat, populisme kanan adalah serangan terhadap tirani meritokrasi.<sup>34</sup>

Dalam kritiknya terhadap meritokrasi, Sandel konsisten dengan pandangannya bahwa prinsip-prinsip liberalisme prosedural menciptakan masyarakat minus solidaritas. Keyakinan meritokratis bahwa orang berhak mendapatkan kekayaan apapun yang diberikan pasar sebagai balas jasa atas prestasi individu membuat solidaritas menjadi sebuah proyek yang mustahil.<sup>35</sup> Prinsip meritokratis merusak semua jenis ikatan sosial karena prestasi individu dilepaskan dari sumber daya sosial yang menghidupinya. Prinsip ini mempolarisasi masyarakat ke dalam *winner and losers*. Dengan demikian, individualisme dan liberalisme adalah beberapa alasan di balik meningkatnya polarisasi dalam masyarakat demokratis yang memuncak dalam fenomena kebangkitan populisme kanan. Karena itu, uraian tentang populisme kanan dan meritokrasi dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan dua karakter fundamental pandangan sosial dan politik masyarakat liberal yaitu individualisme dan hegemoni pasar.

Untuk keluar dari situasi ini, Sandel menawarkan revitalisasi diskursus publik yaitu peninjauan kembali premis-premis dasar liberalisme kontemporer. Itu berarti, Sandel tidak hendak menggantikan liberalisme melainkan memberi koreksi. Demi menciptakan masyarakat toleran, liberalisme menghindari pembicaraan tentang konsep hidup baik dan argumentasi moral substantif dalam politik. Bagi Sandel, tiga dekade globalisasi pasar bebas dan liberalisme teknokratik yang bersenyawa dengan prinsip meritokrasi telah mengosongkan perdebatan etis dari diskursus publik, menyingkirkan peran politik *demos*, mempertajam ketidaksetaraan, menciptakan polarisasi sosial. Semua ini membangkitkan reaksi populis yang mengisi

---

<sup>34</sup> Sandel, "Populism," 356.

<sup>35</sup> Sandel, *The Tyranny of Merit*, 212.

kekosongan itu dengan propaganda intoleran dan nasionalisme sempit.<sup>36</sup> Sandel menawarkan argumen tentang perdebatan konsep hidup baik guna menjawab tantangan populisme kanan yang mengisi ruang publik dengan wacana intoleran, xenofobia, dan nasionalisme sempit.

Bagaimana dengan Indonesia? Sekurang-kurangnya, sejak kontestasi pilpres pada 2014 dan 2019 antara dua tokoh populis, Jokowi dan Prabowo, dan sejak pilkada DKI Jakarta 2017, populisme kanan telah menjadi fenomena politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Jokowi dan Prabowo sama-sama berusaha menarik suara rakyat dengan retorika nasionalisme dan keadilan sosial, serta mengecam elit politik oligarkis. Keduanya juga menyuarakan sentimen nasionalis dan anti-asing, meskipun Jokowi kelihatan lebih lunak dan Prabowo lebih keras.<sup>37</sup> Sedangkan dalam pilkada Jakarta 2017, kontestasi wacana “Islam radikal” versus “Islam plural/toleran” menciptakan kubu politik anti-Ahok dan pro-Ahok dalam politik elektoral.<sup>38</sup> Gelombang populisme kanan yang diperbesar lewat hoaks dan ujaran kebencian di media sosial ini memicu polarisasi sosial dan mengikis solidaritas kebangsaan.

Kritik Sandel terhadap liberalisme dan tirani meritokrasi relevan dalam mengurai fenomena populisme kanan di Indonesia. Jika bangsa ini berdiri atas dasar kehendak untuk hidup bersama, maka terlepasnya ikatan-ikatan kolektif dan runtuhnya solidaritas kebangsaan akibat ideologi-ideologi fanatik, intoleran dan individualistik akan membuat bangsa ini perlahan-lahan membusuk. Seperti diuraikan Sandel di atas, populisme kanan adalah lukisan yang jelas dan lengkap tentang hal itu. Selain itu, sebagaimana pendapat Vedi R. Hadiz, munculnya populisme kanan dan pemimpin populis di Indonesia adalah ekspresi protes terhadap ketidakadilan sistematis yang tak pernah disentuh selama dua dekade demokrasi Indonesia. Dia menambahkan, Indonesia sekarang tengah berada dalam posisi kesenjangan sosial paling tinggi sepanjang catatan sejarah. Kesenjangan itu terungkap dalam fakta bahwa 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset *American Standard*.<sup>39</sup> Ketidaksetaraan yang meningkat karena menguatnya oligarki dan preferensi pasar ini juga didorong oleh kecenderungan meritokratis. Segelintir elit oligarkis dan orang kaya yang menguasai sumber daya ekonomi berusaha menghirup terlalu dalam kesuksesan dan kekayaan mereka, sementara sebagian besar masyarakat kecil merayap dalam kemiskinan dan tergusur hak-haknya. Semakin kita percaya bahwa kesuksesan kita adalah hasil kerja keras kita sendiri, dan penderitaan orang-orang kecil adalah kesalahan mereka sendiri, ikatan kolektif dan

---

<sup>36</sup> Sandel, “Populism,” 359.

<sup>37</sup> Vedi R. Hadiz and Richard Robison, “Competing Populism in Post-authoritarian Indonesia,” *International Political Science Review*, Vol. 38 (2017), 493, DOI: 10.1177/0192512117697475.

<sup>38</sup> Abdul Mughis Mudhoffir, dkk., “Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia,” *Prisma*, Vol. 36 (2017): 58.

<sup>39</sup> Kolom Dialog, “Kebangkitan Populisme Islam,” *Prisma*, Vol. 36 (2017): 81.

solidaritas komunitas sebagai satu bangsa juga semakin keropos. Polarisasi sosial akibat pengerosan ikatan kolektif ini memicu protes dan gerakan populisme kanan di Indonesia.

Revitalisasi diskursus publik yang diproposalkan Sandel juga amat relevan. Kita memiliki Pancasila sebagai basis etis dan filosofis yang menjamin perdebatan konsep hidup baik diberi tempat di ruang publik tanpa mengabaikan komitmen liberal terhadap toleransi, HAM dan kebebasan. Gagasan Sandel amat cocok dengan praktek demokrasi kita yang terbuka bagi nilai-nilai multikultural sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila. Pancasila menekankan konsep diferensiasi dan menolak privatisasi konsep hidup baik atau pandangan etis sebagaimana dalam masyarakat liberal.<sup>40</sup> Pancasila juga adalah rumah bersama yang mengikat kita dalam kesatuan kolektif dan solidaritas sebagai satu bangsa. Itu berarti, Pancasila adalah sebuah prinsip etis-filosofis atau sebuah filsafat publik yang mencegah kita terbenam dalam keasyikan etika kesuksesan barbar seperti meritokrasi. Gagasan Sandel memprovokasi kita memikirkan kembali solidaritas kebangsaan yang secara filosofis terkandung dalam Pancasila. Dalam penelitian ini, saya akan memperlihatkan peran Pancasila dalam membangun reimaginasi solidaritas kebangsaan guna menghadapi tantangan populisme kanan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, judul yang penulis berikan untuk tesis ini adalah **“Populisme Kanan dan Reimaginasi Solidaritas Kebangsaan: Sebuah Kajian Berdasarkan Kritik Michael Sandel Terhadap Liberalisme dan Tirani Meritokrasi.”** Dengan judul ini, penulis hendak menguraikan beberapa hal pokok dalam tulisan ini yaitu: Pertama, kritik Sandel terhadap pengandaian-pengandaian dasar liberalisme Rawls; Kedua, kritik Sandel terhadap tirani meritokrasi; Ketiga, diagnosis Sandel tentang populisme kanan dalam kerangka kritik terhadap liberalisme dan tirani meritokrasi; Keempat, gagasan Sandel tentang revitalisasi diskursus publik; Kelima, relevansi pemikiran Sandel di Indonesia dalam upaya reimaginasi solidaritas kebangsaan guna menghadapi tantangan populisme kanan, dan bagaimana menafsir peran Pancasila menurut perspektif Sandel.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka proses penulisan Tesis ini dipandu beberapa pertanyaan pokok berikut: Bagaimana Sandel menguraikan populisme kanan dalam hubungan dengan kritik terhadap liberalisme dan tirani meritokrasi? Bagaimana liberalisme dan tirani meritokrasi mengikis solidaritas dan ikatan-ikatan kolektif? Sudut pandang apa yang diajukan Sandel untuk mengatasi populisme kanan, dan bagaimana relevansinya di Indonesia saat ini?

---

<sup>40</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), 43.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian dan tulisan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut: a) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar magister di STF Driyarkara; b) Untuk memberikan penjelasan alternatif tentang populisme kanan dari perspektif Sandel; c) Untuk memberikan perspektif baru menghadapi tantangan populisme kanan di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan harapan: a) Mengembalikan diskursus moral ke dalam politik dan demokrasi; b) Memperkaya refleksi filsafat politik terhadap fenomena-fenomena demokrasi kontemporer; c) Menunjukkan kepedulian terhadap kelas marginal.

### **1.5 Metode Penulisan**

Metode yang dipakai dalam proses penulisan atau penelitian ini ialah metode kepustakaan. Referensi utama ialah karya Sandel antara lain *Liberalism and the Limit of Justice*; *Public Philosophy: Esai on Morality in Politics*; *Democracy's Discontent: America in Search of Public Philosophy*; *The Tyranny of Merit*. Artikelnya dalam jurnal seperti "The Procedural Republic and The Unencumbered Self," dan "Populism, liberalism and democracy" adalah sejumlah artikel penting yang merupakan ringkasan pokok-pokok kritik Sandel terhadap liberalisme dan inti sari gagasannya tentang meritokrasi dan populisme kanan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Tulisan ini akan diuraikan dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut. Bab pertama menguraikan latar belakang judul penelitian ini, rumusan masalah, metode penelitian yang dipakai, rumusan tesis penulis, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Bab kedua memperkenalkan biografi intelektual Sandel dan pokok-pokok pemikirannya. Bab ketiga menguraikan kritik Sandel terhadap konsep-konsep dasar liberalisme Rawls. Uraian ini diawali dengan pengenalan singkat tentang populisme (kanan), konsep Rawls tentang keadilan sebagai *fairness* dan tinjauan umum kritik komunitarian. Bab keempat dan kelima menguraikan gagasan Sandel tentang populisme kanan dari sudut pandang kritiknya terhadap liberalisme dan tirani meritokrasi. Bab keempat menguraikan hubungan populisme kanan dan kegagalan republik prosedural (politik liberal). Bab kelima menguraikan hubungan populisme kanan dan tirani meritokrasi. Uraian pada kedua bab ini terkait erat. Bab keenam menguraikan relevansi pemikiran Sandel di Indonesia dalam upaya reimajinasi solidaritas kebangsaan menghadapi tantangan populisme kanan, dan apa peran Pancasila. Bab ketujuh berisi catatan kritis atas pemikiran Sandel dan kesimpulan atas seluruh uraian dalam Tesis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Oscar Garcia. *Left-Wing Populism The Politics of the People*. UK: Emerald Publishing, 2020.
- Albertazzi, Danniele and Duncan McDonell. "Introduction: The Sceptre and The Spectre." In *Twenty-First Century Populism, The Spectre of Western Europe Democracy*, edited by Danniele Albertazzi and Duncan McDonell. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Alexander, Jeffrey C. "Frontlash/Backlash: The Crisis of Solidarity and the Threat to Civil Institutions." *American Sociological Association*, 48 (1) (2018), DOI: 10.1177/0094306118815497.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities*. London: Verso, 2006.
- Anthony, Andrew. "Master of Life's Big Question." *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/theobserver/2012/apr/08/observer-profile-michael-sandel> (diunduh 20 September 2021).
- Arditi, Benjamin. "Populism as an Internal Pheriphery of Democratic Politics." In *Populism and the Mirror of Democracy*, edited by Fransisco Panizza. London-New York: Verso, 2005.
- Arendt, Hannah. *The Origin of Totalitarianism*. New York: A Harvest Book, 1979.
- , *Human Condition*. USA: University of Chicago Press, 1998.
- Azhra, Ayumardi. "Demokrasi Deliberatif." *Kompas*, 4 November 2021.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Baker, Edwin. "Sandel on Rawls." *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 133, 1985.
- Berger, Peter L. "The Deseccularization of the World: A Global Overview." In *The Deseccularization of the World Resurgent Religion and World Politics*, edited by Peter L. Berger. Washington: William B. Eerdmans Publishing Company, 2005.
- Brown, Rebecca C. H. "Social Values and the Corruption Argument Against Financial Incentives for Healthy Behaviour." *J Med Ethics*, Vol. 43 (2017), doi:10.1136/medethics-2016-103372.
- Buchanan, Allen E. "Assesing the Comunitarian Critique of Liberalism." *Ethics*, Vol. 99, Juli, 1989.
- Choat, Simon. "Everything for Sale? Neoliberalism and the Limits of Michael Sandel's Philosophical Critique of Market." *New Political Science*, 40:1 (2018), DOI: 10.1080/07393148.2017.1417192.
- Colomer, Joseph M., and Ashley L. Beale. *Democracy and Globalisation*. London: Routledge, 2020.

- Coman, Julian. "Michael Sandel: The Populist Backlash has been a revolt against the tyranny of merit." <https://www.theguardian.com/books/2020/sep/06/michael-sandel-the-populist-backlash-has-been-a-revolt-against-the-tyranny-of-merit> (diunduh 6 September 2021).
- Cowden, Stephen, and Singh. "Community Cohesion, Communitarianism, and Neo-liberalism." *Critical Social Policy*, Vol. 37 (2) (2017), <https://doi.org/10.1177%2F0261018316670252>.
- Crick, Bernard. "Populism, Politics and Democracy." *Democratization*, Vol. 12, No. 5 (2005), DOI:10.1080/13510340500321985.
- Dagger, Richard. "The Sandelian Republic and the Unencumbered-Self." *The Review of Politics*, Vol. 61, No. 2, 1999.
- Dhakidae, Daniel. *Menerjang Badai Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2015.
- , "Sejarah Berakhir dan Sejarah Baru Berawal." *Prisma*, Vol. 36, 2017.
- Djani, Luky. "Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme." *Prisma*, Vol. 36, 2017.
- Errera, Rogger. "Dilemmas of Justice." *East European Constitutional Review*, Vol.12, 1992.
- Farrelly, Collin. "Does Rawls Support The Procedural Republic? A Critical Response to Sandel's Democracy's Discontent." *Politics*, 19 (1), 1999.
- Forst, Reiner. *Context of Justice. Political Philosophy Beyond Liberalism and Communitarianism*. London: University of California, 2000.
- Fukuyama. *The End of History and the Last Man*. New York: The Free Press, 1992.
- George, Cherian. *Pelintiran Kebencian*, penerj. Ihsan Ali-Fauzi dan Irsyad Rafsadie. Jakarta: PUSAD, 2017.
- Gerung, Rocky. "Mengaktifkan Politik." Dalam *Demokrasi dan Kekecewaan*, ed. Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East*. UK: Cambridge University Press, 2016.
- Hadiz, Vedi R., and Richard Robison. "Competing Populism in Post-authoritarian Indonesia." *International Political Science Review*, Vol. 38 (4) (2017), DOI: 10.1177/0192512117697475.
- Hall, Terry. "Beyond the Procedural Republic: The Communitarian Liberalism of Michael Sandel." In *An Introduction to Contemporary Liberal Political Theory and Its Critics*, edited by Christopher Wolfe. USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.
- Halterman, Andrew, et al. "How Right Wing is Right Wing Populism?" *Political Science*, No.22 (2018), <https://www.researchgate.net/publication/328471779>.
- Hamid, Usman. "Merosotnya Ruang Publik untuk Kritik dan Protes." Dalam *Demokrasi Tanpa Demos*, ed. Wijayanto, dkk. Jakarta: LP3ES, 2021.

- Hardiman, F. Budi. *Memahami Negativitas*. Jakarta: Kompas, 2005.
- , *Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- , *dalam moncong oligarki*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- , "Kebangkitan Populisme Kanan dalam Negara Hukum Demokratis." *Prisma*, Vol. 36, 2017.
- , "Gerakan Murka Demorkasi." *Kompas*, 2 Maret 2017.
- Hasdell, R. *What We Know About Universal Basic Income*. Stanford: Basic Income Lab, 2020.
- Hatta, M. *Demokrasi Kita*, Cet. 4. Bandung: SEGA ARSY, 2014.
- Hidayat, Syarif. "Vote Minus Voice." Dalam *Demokrasi Tanpa Demos*, ed. Wijayanto, dkk. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Hochschild, Jeniffer. "Left, Right and Meritocracy, Comment on M. Sandel's *The Tyranny of Merit*." *American Journal of Law and Equality*, Issue 1 (2021), [https://doi.org/10.1162/ajle\\_a\\_00015](https://doi.org/10.1162/ajle_a_00015).
- Huang, Young. "Justice as Virtue, Justice According to Virtues." In *Encountering China, Michael Sandel and Chinese Philosophy*, edited by M. Sandel and Paul J. D'Ambrosio. Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
- Huiling, Zhu. "Sandel's Ideas on Civic Virtue." In *Encountering China, Michael Sandel and Chinese Philosophy*, edited by M. Sandel and Paul J. D'Ambrosio. Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
- Huntington, Samuel. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, penerj. M. Sadat Ismail. Jakarta: Penerbit Qalam, 2012.
- Jaede, Maximilian. "The Concept of the Common Good." *Working Paper Series of the Political Settlements Research Programme (PSRP)*, University of Edinburgh (2019). <https://www.politicalsettlements.org/publications-database/the-concept-of-the-common-good/>.
- Jena, Yeremias. "Kritik Michael Sandel atas Teknologi *Human Enhancement*." *JURNAL ETIKA*, Vol. 5 (2013), <https://www.researchgate.net/publication/323747987>.
- Kalyvas, Andreas. "The Democratic Narcissus." In *Law and Agonistic Politics*, edited by Andrew Schaap. UK: University of Exeter, 2009.
- Kaul, Volker. "Populism and the Crisis of Liberalism." *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 44 (4) (2018), DOI: 10.1177/019145371877495.
- Kautz, Steven. *Liberalism and Community*. London: Cornell University Press, 1995.
- Keys, Mary M. *Aquinas, Aristotle and the Promise of the Common Good*. London: Cambridge University Press, 2006.



- Kleden, Ignas. "Nasionalisme Mencari Demokrasi." *Tempo, Merawat Indonesia*, Agustus 2005.
- , *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka*. Jakarta: Obor, 2020.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, penerj. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Laclau, Ernesto. *Politics and Ideology in Marxist Theory*. London: NLB, 1977.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Levitsky, Steven and Daniel Ziblatt. *How Democracy Die*. UK: Penguin Books, 2018.
- Lintott, Andrew. "Aristotle and Democracy." *Classical Quarterly*, Vol. 42:1 (1992), <http://www.jstor.org/stable/639148> .
- Lund, William R. "Perfectionism, Freedom and Value: Sandel's Formative Project." *Social Theory and Practice*, Vol. 28, No. 4, 2002.
- MacIntyre, Alasdair. "The Virtues, the Unity of a Human Life and the Concept of Tradition." In *Liberalism and its Critics*, edited by M. Sandel. New York: New York University Press, 1984.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2013.
- , "Pancasila dalam Diskursus Liberalisme versus Komunitarianisme." *KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2, Desember 2015.
- , "Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel." *Jurnal Ledalero*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.212.127-144>.
- Madung, Otto Gusti, and Winibaldus Stefanus Mere. "Constructing Modern Indonesia Based on Pancasila in Dialogue with the Political Concepts Underlying the Idea of Human Rights." *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 5 (June 2021), doi: 10.19184/jseahr. V5i1.20258.
- Magnis-Suseno, F. *Etika Politik*, Cet. 8. Jakarta: Gramedia, 2016.
- , "Tantangan Pancasila Pasca-Orde Baru." *Kompas*, 17 November 2021.
- Mandle, John. *Rawls's A Theory of Justice*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Mandler, Peter. *The Crisis of The Meritocracy*. London: Oxford University Press, 2020.
- Markovits, Daniel. *The Meritocracy Trap*. New York: Penguin Press, 2019.
- Mietzner, Marcus. "Fighting Illiberalism with Illiberalism, Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia." *Pacific Affairs*, Vol. 91, No. 2 (Juni 2018), DOI: <https://dx.doi.org/10.5509/2018912261>.

- Miller, David. *Political Philosophy*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Moore, Margaret. "Liberalism, Communitarism and the Politics of Identity." In *Contemporary Debates in Political Theory*, edited by Thomas Christiano and John Christman. UK: Wiley-Blackwell, 2009.
- Mouffe, Chantal. *The Democratic Paradox*. London: Verso, 2000.
- . *Populisme Kiri*, penerj. Melfin Zaenuri. Yogyakarta: Antinomi, 2018.
- Mubin, F., and A. Roziqin. "Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia." *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 8, No. 8 (August 2018), <https://www.researchgate.net/publication/327280599>.
- Mudde, Cas and Cristobal Rovira Kaltwasser, *Populism A Very Short Introduction*. USA: Oxford University Press, 2017.
- Mudhoffir, Abdul Mughis, dkk. "Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia." *Prisma*, Vol 36, 2017.
- Muelen, Ruud ter. "Solidarity, Justice and Recognition of the Other." *Theor Med Bioeth*, Vol. 37 (2016), DOI 10.1007/s11017-016-9387-3.
- Mundayat, Aris Arif. "Mengembalikan Republik Melalui Populisme Pancasila: Mungkinkah?" Dalam *Demokrasi Tanpa Demos*, ed. Wijayanto, dkk. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Neuhaus, Richard J. "The Naked Public Square." *Review* of "The State and the Soul," by Michael Sandel. *New Republic*, 10 June 1985.
- Nino, Carlos S. "The Communitarian Challenge to Liberal Rights." *Law and Philosophy*, Vol. 8, 1989.
- Nussbaum, Martha C. "Human Functioning and Aristotelian Justice: In Defence of Aristotelian." *Political Theory*, 20:2, 1992.
- Osnos, E. "China's Encounter with Michael Sandel." In *Encountering China. Michael Sandel and Chinese Philosophy*, edited by M. Sandel and Paul J. D'Ambrosio. Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
- . "A Political Philosopher on Why Democrats Should Think Differently About Merit (Interview with Michael Sandel)." *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/news/q-and-a/a-political-philosopher-on-why-democrats-should-think-differently-about-merit> (diunduh 22 Desember 2021).
- Pabst, Adrian. "On the Convergence of Liberalism and Populism." *Telos*, Vol. 185 (Winter 2018), doi:10.3817/1218185201.
- Panizza, Fransisco. "Populism and the Mirror of Democracy." In *Populism and the Mirror of Democracy*, edited by Fransisco Panizza. London: Verso, 2005.
- Platz, Jeppe Von. *Theories of Distributive Justice*. London & New York: Routledge, 2020.

- Priyono, Herry. *Korupsi*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Raharjo Jati, Wasisto. "Trajektori Populisme Islam di Kalangan Kelas Menengah Muslim Indonesia." *Prisma*, Vol. 36, 2017.
- Rawls, J. *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, 2009.
- Reuters. "Philosopher Sandel says Saudi reforms need critical thinking to succeed." <https://www.reuters.com/world/middle-east/philosopher-sandel-says-saudi-reforms-need-critical-thinking-succeed-2021-12-11/> (diunduh pada 13 Desember 2021).
- Rorty, Richard. *Contingency, Irony and Solidarity*. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Rosenbaum, Stuart. *Race, Justice and American Intellectual Traditions*. USA: Palgrave Pivot, 2018.
- Sandel, Michael. *Liberalism and The Limit of Justice*, Second Edition. USA: Cambridge University Press, 1998.
- , *Liberalism and Its Critics*, edited by M. Sandel. New York: New York University Press, 1984.
- , "Morality and the Liberal Ideal." *New Republic*, 7 May 1984.
- , "The Procedural Republic and The Unencumbered Self." *Political Theory*, Vol. 12, No. 1 (1984), <http://links.jstor.org/sici?sici=0090-5917%28198402%2912%3A1%3C81%3ATPRATU%3E2.0.CO%3B2-X>.
- , *Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press, 1996.
- , "The Constitution of the Procedural Republic: Liberal Rights and Civic Virtues." *Fordham Law Review*, Vol. 66 (1997), <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol66/iss1/1>.
- , "Liberalism and Republicanism, Friend or Foes?" *The Review of Politics*, Vol. 61, No.2 (1999), <http://www.jstor.org/stable/1408354>.
- , *Public Philosophy: Essay on Morality in Politics*. Massachusetts: Harvard University Press, 2005.
- , *Justice What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010.
- , *What Money Can't Buy: The Moral Limit of Market*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2013.
- , "Market Reasoning as Moral Reasoning, Why Economists Should Re-engage with Political Philosophy." *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 27, No.4 (2013), <http://dx.doi.org/10.1257/jep.27.4.121>.

- , "Michael Sandel: This much I know." Interview by T. Adams, *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/apr/27/michael-sandel-this-much-i-know> (diunduh 20 September 2021).
- , "Lesson From the Populist Revolt." *Mint*, Thursday, 30 Desember 2016, <https://www.livemint.com/Opinion/7gq9vTNn9nmIPpbRiohi1M/Michael-J-Sandel--Lessons-from-the-populist-revolt.html> (diunduh pada 11 November 2021).
- , "Learning From Chinese Philosophy." In *Encountering China, Michael Sandel and Chinese Philosophy*, edited by M. Sandel and Paul J. D'Ambrosio. Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
- , "Populism, Liberalism and Democracy." *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 44 (4) (2018), <https://doi.org/10.1177/0191453718757888>.
- , "How to Save Democracy." *NEW STATESMAN*, 18-24 May 2018.
- , "Right-Wing Populism is a Progressive Politics Fails-Is It too Late to Save Democracy?" *New Statesman* (May 21, 2018), Right-wing populism is rising as progressive politics fails â?" is it too late to save democracy? (newstatesman.com).
- , *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* USA: Farrar, Straus and Giroux, 2020.
- , "What Liberals Get Wrong about Work." *The Atlantic*, 2 September 2020, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/09/contributive-justice-and-dignity-work/615919/> (diunduh 21 Desember 2020).
- , "Are We All in This Together?." <https://www.nytimes.com/2020/04/13/opinion/sunday/covid-workers-healthcare-fairness.html> (diunduh 27 Agustus 2021).
- , "A New Politics of the Common Good." Lecture at AIPS, Korea, 19 Agustus 2012. <http://asanints.org> (diunduh 28 September 2021).
- Schwartz, Joseph M. *The Permanence of the Political*. UK: Princeton University Press, 1995.
- Shaw, Carl, K.Y. "Civic Republicanism and Democratic Politics." *EURAMERICA*, Vol. 40, No. 4, December 2010.
- Sudarminta, Justin. *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Sunardi, St. "Islamic Populism: Asymmetrical, Multi-Class Coalition-Based Social Mobilization." *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 2, Februari 2019.
- Suny, Ronald Grigor. "The Crisis of Bourgeois Democracy: the Fate of an Experiment in the Age of Nationalism, Populism and Neo-liberalism." *New Perspective on Turkey*, No. 57 (2017), <https://doi.org/10.1017/npt.2017.32>.
- Tam, H. *Communitarianism A New Agend for Politics and Citizenship*. UK: Macmillan, 1998.

- Tan, Peter. *Paradoks Politik*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018.
- Taylor, Charles. *The Source of the Self*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- . "Hegel: History and Politics." In *Liberalism and its Critics*, edited by M. Sandel. New York: New York University Press, 1984.
- The Decision Lab. "Michael Sandel, The Celebrity Political Philosopher." <https://thedeclarationlab.com/thinkers/philosophy/michael-sandel/>(diunduh 28 juni 2021).
- Walzer, Michael. "Welfare, Membership and Need." In *Liberalism and its Critics*, edited by M. Sandel. New York: New York University Press, 1984.
- Wibowo, Seno Gumbira and Jamal Wiwoho. "The Implication of Globalization on the Pancasila-Based Principle of Local Democracy in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 6, No. 2 (2019), Doi: <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a8>.
- Winters, Jeffrey A. "Demokrasi Parsial di Indonesia." Dalam *Demokrasi Tanpa Demos*, ed. Wijayanto, dkk. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Wooldridge, Adrian. *The Aritocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World*. USA: Penguin Books, 2021.
- Youngmevittaya, Wanpat. "A Critical Reflection on Michael J. Sandel: Rethinking Communitarianism." *Journal of Social Sciences, Naresuan University*, Vol. 15, No.1 (2019). doi: 10.14456/jssnu.2019.4.
- Young, Michael. *The Rise of Meritocracy 1870-2033, An Essay on Education and Equality*. London: Penguin Books, 1961.
- Zizek, Slavoj. *Pan(dem)ic Covid-19 Shakes the World*. New York & London: OR Books, 2020.

